

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy & Abdul Halim. (2006). "Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan studi pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera". Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2 No 2. Nov. 2006.
- Adisasmita, Rahardjo. (2014). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. (2011). Sisi Gelap Otonomi Daerah (Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi). Widya Padjajaran.
- Arikunto, Suharsimi (2013). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aziz, Abdul. 2015. Pemda Semakin Bergantung ke Pusat. Diambil dari <http://www.beritasatu.com>, pada tanggal 27 Maret 2017.
- Bastian, Indra (2009). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra (2007). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- Bawono, Icuk Ranga & Mochamad Novelsyah. (2012). Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, Siska Puspita & Suyanto. (2015). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri. 2013. DAU Pegang Peranan Penting untuk Pembangunan Daerah. Diambil dari <http://keuda.kemendagri.go.id>, pada tanggal 20 Maret 2017.

Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunantara, Putu Candra & A.A.N.B. Dwirandra. (2014). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Perumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali." E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 7, No. 3: 529-546. ISSN: 2302-8556.

Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2006). "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi." Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1. Hal.: 53-64.

Haryanto, Joko Tri. 2016. Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016. Diambil dari <http://www.kemenkeu.go.id>, pada tanggal 30 Desember 2016.

Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika & A.A.N.B. Dwirandra. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi." (2014). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 7, No. 1. 79-92. ISSN: 2302-8556.

Kaloh, J. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Satu Solusi dalam menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global). Cetakan Ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta Jakarta.

Keefer, Philip & Stuti Khemani (2003). The Politecal Economy of Public Expenditure. *Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.

Kristiawati, Endang. (2015). "Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat." Akuntabilitas. Vol.8, No. 3, Desember 2015. P-ISSN: 1979-858X. Hal 171-190.

Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi & Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mahenraz. 2010. Fungsi Retribusi dalam meningkatkan PAD. Diambil dari <https://mahenraz.wordpress.com>, pada tanggal 30 Desember 2016.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI

Mardiasmo Wakil Menteri Keuangan. 2015. Peningkatan Transfer ke Daerah untuk Dorong Pertumbuhan, Bukan Ternak Uang. Diambil dari <http://kemenkeu.go.id>, pada tanggal 27 Maret 2017.

Mayasari, Luh Putu Rani., Ni Kadek Sinarwati, & Gede Adi Yuniarta. (2014). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng." E-Journal S1 Ak Univesitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol. 2 No. 1.

Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. (2012). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Oktora, Fahri Eka & Winston Pontoh. (2013). "Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah." Jurnal Accountability. Vol. 2, No. 1. Juni 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode & Data Wilayah Administrasi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Sebagian DAU Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Permatasari, Isti dan Tatik Mildawati. (2016). "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Jawa Timur." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5, No. 1. STIESIA Surabaya. Januari 2016. ISSN: 2460-0585.

Pituringasih, Endar & M. Irwan. (2016). "Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa." *JAFFA*. Vol. 04, No. 1. April 2016 Hal. 30-45.

Rao, Purba 1996, *Measuring Consumer Perceptions Through Factor Analysis*, *The Asian Manager*. February-March, pp. 28-32.

Rosdiana, Dian. 2017. Pusat Informasi dan Komunikasi Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Rostanty, Maya. 2016. Dampak Penundaan Sebagian Transfer DAU 2016 terhadap Pelayanan Publik di Daerah. Diambil dari <http://pattiro.org> pada tanggal 20 Maret 2017.

Santoso, Slamet. 2015. *Penelitian Kuantitatif Metode Dan Langkah Pengolahan Data*. Ponorogo: UMPO Press.

Sari, Rosy Puspita & I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung." *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 3. No. 9 : 420-427 ISSN: 2303-0178.

Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening." (2012). Vol. 9, No. 1. Juni 2012 ISSN 1411-1497.

Siregar, Baldric & Bonni. (2001). Akuntansi Pemerintahan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta 2001 Edisi ke 3.

Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini & Ni Luh Supadmi. 2014. "Pengaruh PAD, DAU, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi." ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 7, No. 2. (2014): 477-495.

Subarno, Hari. (2007). Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Wertianti, I G A Gede & A.A.N.B. Dwirandra. (2013). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Moderasi." E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 4, No. 3. (2013): 567-584. ISSN: 2302-8556.

Widjaja. (2007). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yudarta.I Putu Dharmanu.2015. Permasalahan Dana Alokasi Umum. Diambil dari <http://www.kompasiana.com>, pada tanggal 18 Maret 2017.

